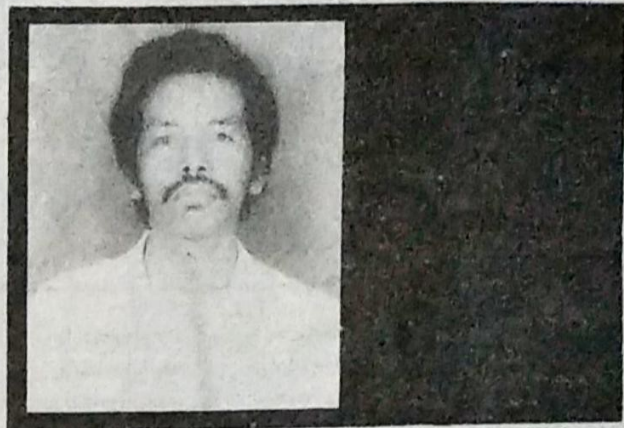


Setelah kelahiran ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) tahun 1990 lalu, ada pandangan bahwa kondisi politik umat Islam di Indonesia sedang mengalami perubahan, walaupun memang, ICMI sendiri bukan organisasi politik. Untuk mendalami permasalahan ini lebih jauh, berikut hasil wawancara RISALAH dengan **Abdul Munir Mulkhan, MA.**, seorang Master Sosiologi UGM yang kini menjadi dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga dikenal sebagai penulis produktif, baik berbentuk buku ataupun tulisan-tulisan lepas di berbagai media massa.

ICMI dan Politik Islam di Indonesia

Bagaimana tentang isue perubahan pola politik di Indonesia akhir-akhir ini?

Begini ya, akhir-akhir ini, satu perilaku politik di Indonesia itu makin melebar tidak hanya ditentukan oleh lembaga politik formal. Sesungguhnya kalau kita mau formal politik, ya ada GOLKAR, ada PPP, ada PDI. Kalau pengertian aktivitas politik itu dikaitkan dengan lembaga-lembaga formal. Tapi akhir-akhir ini muncul suatu fenomena baru yang sesungguhnya merupakan kritik terhadap peran lembaga-lembaga formal. Seperti munculnya organisasi-organisasi massa non politis, tetapi sulit dihindarkan dari target-target politik. Mungkin banyak juga dikukuhkan itu sebagai suatu peniruan karena dianggap sejak 1990 ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia), organisasi non politik tetapi terkesan luas melakukan aktivitas politik. Kalau dari segi kelembagaannya memang tidak menunjukkan organisasi politik. Tapi saya kira menunjukkan spekulasi politik secara formal melalui organisasi-organisasi khusus. Organisasi-organisasi politik formal tidak lagi menampung aspirasi politik yang ada di dalam masyarakat. Kalau pendekatan pilihan-pilihan strategis ada organisasi-organisasi menyatakan struktural atau kultural, sesungguhnya menurut saya sulit dibedakan secara tegas, apakah sekelompok organisasi itu hanya menggunakan strategi kultural atau struktural semata-mata. Di dalam format politik Indonesia itu lebih sebagai pendekatan organisasi yang mungkin lebih menaruh perhatian pada upaya-upaya struktural melalui perundang-undangan, melalui dasar-dasar politik formal, itu memperjuangkan cita-cita politik, kehendak politik. Tetapi, saya kira pada saat yang sama orang yang bersangkutan juga melakukan upaya-upaya kultural mengembangkan satu visi politik tertentu. Dan sebaliknya pendekatan-pendekatan kultural tidak juga bisa menghindar dari pendekatan-pendekatan struktural. Kalau kemudahan organisasi yang bersangkutan itu atau kelompok atau organisasi itu kemudian memperjuangkan aspirasi politiknya dengan memperhatikan lembaga-lembaga politik formal yang lainnya, itu berarti pendekatan struktural. Maka, menurut saya itu pendekatan (yang akhir-akhir ini memang berkembang) tema-tema struktural,



kultural menurut saya juga itu sebuah antisipasi dari perkembangan mekanisme politik yang ada.

Sementara ICMI keberadaannya di sebelah mana?

Secara formal, dia kultural. Bagaimana dia mengembangkan satu situasi masyarakat pendukungnya. Dan pendukung disini tidak hanya dalam pengertian formal saja. Mereka yang aktif di ICMI itu boleh dari masyarakat luas. Jadi sifatnya itu kultural. Nanti kalau kemudian dia mampu mencoba mengakses kepada lembaga-lembaga formal maka bisa menjadi struktural. Nah, sejauhmana besarnya kedua belah sektor itu, sektor kultural atau struktural. Saya kira, ya, secara formal ICMI mesti kultural misalnya. Tapi seberapa besar bisa kita bedakan ICMI lebih besar ke struktural atau ke kultural tadi. Cukup sulit. Bahwa ICMI mempunyai akses ke struktur itu, Saya kira bukan ICMI saja kok. ICMI lebih banyak karena dia lebih lama daripada ormas-ormas yang baru lho. Ya ormas-ormas di luar yang konvensional seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya.

Apakah politik Islam di Indonesia bisa dikatakan sebagai mainstream (jalur pokok) di dalam konstalasi politik nasional sekarang?

Sebetulnya nggak mudah juga disebutkan. Kalau ukurannya misalnya kuantitatif orang Islam yang berada di lembaga-lembaga politik (baik itu pemerintah atau formal, legislatif atau yudikatif) saya kira sejak dulu juga selalu lebih banyak. Karena memang umat Islam itu mayoritas. Kalau itu kemudian dianggap *mainstream* ya *mainstream* lah. Tapi kalau kemudian ukurannya adalah seberapa besar cita-cita Islam, misalnya, saya kira sulit juga apa cita-citanya (Islam). Jadi mungkin *mainstream* atau tidak sesungguhnya tergantung pada apa yang kita jadikan ukuran. Kalau kemudian sekarang ini orang cenderung melihat Islam sebagai *mainstream* karena banyak organisasi yang secara formal baik dirinya ataupun organisasi menyatakan diri sebagai Islam. Atau mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga yang disebut Islam. Mungkin begitu.

Kalau tumbuhnya ormas baru termasuk ormas yang dulunya partai politik kemudian sekarang reinkarnasi menjadi sebuah ormas apa itu gambaran akan adanya lagi politik aliran?

Saya melihat itu lebih sebagai belum tertampungnya seluruh aspirasi kepentingan masyarakat di dalam lembaga-lembaga formal yang ada. Kalaupun kemudian ada PNI baru, partai Kristen baru, Masyumi baru dan lain sebagainya, ya itu kan biasa menggunakan sesuatu yang sudah lama dipahami masyarakat apa nanti berkembang menjadi aliran-aliran baru, masa depan ormas itu sendiri juga belum tentu saya kira. Saya lebih melihat itu kan bukan suatu fenomena munculnya aliran-aliran. Tetapi lebih sebagai fenomena belum tertampungnya aspirasi politik berbagai masyarakat dari lembaga-lembaga yang ada.

Tapi ada sinyal itu terjadi sejak terbentuknya ICMI

Ya, kalau itu sebagai reaksi balik dari adanya ICMI kok, menurut saya terlalu menyederhanakan persoalan. Bahwa lalu kalau dianggap itu meniru, ya mungkin "meniru". Begini, orang kan melihat ICMI bukan organisasi politik. Tapi sepertinya punya akses politik yang besar. Maka, mereka-mereka ini atau sekelompok masyarakat yang merasa tidak tertampung aspirasinya oleh ICMI, lalu membuat organisasi baru.

Kemudian kalau dikaitkan dengan demokratisasi, katanya golongan Islam malah yang menjadi penghambat?

Begini, sesungguhnya demokratisasi itu apa sih kan gitu. Kalau kemudian dialamatkan kepada Islam, misalnya kalau demokratisasi itu berperan memberikan pengertian kepada seluruh anggota masyarakat dalam sebuah negara. Saya kira, apa memang benar

Islam dikatakan sebagai penghambat seandainya ya Islam itu mempunyai kolektivitas tunggal. Kemudian umat Islam yang kolektif itu menaruh seandainya umat Islam itu sebuah kolektivitas yang demokratisasi? Kemudian kesadaran politik tunggal, kemudian ia menuntut diberi peran karena memang umat Islam itu mayoritas. Tadi kan demokratisasi memberi peran sebanyak mungkin kepada semua warga negara. Apakah itu bukan sebuah upaya demokratisasi. Jadi mungkin perlu dipertegas dimana letak bahwa umat Islam itu penghambat. Kedua, siapa yang dikatakan Islam itu kan gitu. Jadi, jangan karena satu dua oknum orang misalnya, apapun kapasitasnya lalu kemudian kita katakan mereka mewakili seluruh organisasi. Mungkin dia ketua sebuah organisasi besar, itu tidak bisa mewakili.

Jadi karena umat Islam mayoritas, maka umat Islam harus dapat peran yang lebih besar?

Ya, lihat ukurannya dulu. Bahwa demokratisasi memberi peran seluruh warga negara di dalam pengertian yang luas dalam berpartisipasi pada seluruh mekanisme atau kegiatan kenegaraan. Kalau seluruh umat Islam ikut-ikutan berperan, itu sebagai peran proses demokratisasi. Tapi selanjutnya lagi perlu kita tanya dulu, apa dengan memberi peran yang

lebih kepada organisasi Islam itu sudah dengan sendirinya memberi peran kepada seluruh warga negara yang beragama Islam? Juga belum tentu. Itu kan sangat edukatif karena tidak ada jaminan bahwa masalahnya NU, Muhammadiyah, DDII, itu sudah mencerminkan suara seluruh organisasi Islam dan keseluruhan ummat Islam.

Dari hasil muktamar ICMI kemarin, apa yang menarik dan yang akan menentukan terhadap perjalanan ICMI selanjutnya?

Saya melihat, satu upaya yang baik begitu gencarnya kritik. Dua hal yang luas menjelang muktamar, satu struktur ICMI yang tidak banyak melibatkan lapis-lapis di sekitar pusat pimpinan, lalu kedua keberpihakan pada rakyat lapis bawah. Tentang yang pertama, nampak pada perubahan struktur, yaitu ada sekretaris umum. Dan format yang dipilih sebagai sekum itu dikenal sebagai aktivis LSM. Itu satu. Kemudian yang kedua, baik program maupun pernyataan-pernyataan yang berkembang agak diberi tekanan untuk menarik perhatian pada rakyat. Cuma masalahnya sejauhmana sisi orang atau beberapa orang bisa mengembangkan satu mekanisme tertentu yang baru memberi peluang dialog ICMI dengan berbagai pembina masyarakat yang ada. Kedua, sejauhmana komitmen moral bahwa akan menaruh perhatian ke rakyat misalnya itu terbukti sepanjang lima tahun mendatang. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Tetapi ada antisipasi terhadap kritik itu sudah cukup menarik. Jadi saya kira itu yang perlu dicatat dari muktamar ICMI. □ **M. Taufiq R**

